

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Pada Kabupaten / Kota di Pulau Jawa)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh :**

**FATHONI SIDIQ ARI WIBOWO**

**B200110356**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Pada Kabupaten / Kota di Pulau Jawa)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

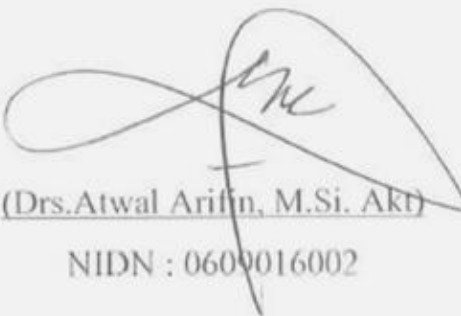
Oleh:

**FATHONI SIDIQ ARI WIBOWO**

**B200110356**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**(Drs. Atwal Arifin, M.Si. AKI)**  
NIDN : 0609016002

HALAMAN PENGESAHAN  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN  
PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa)

Yang ditulis oleh :

FATHONI SIDIQ ARI WIBOWO

NIM B 200 110 356

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari 13 Agustus 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. Drs. Atwal Arifin, M.Si, Akt  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Noer Sasongko, SE, M.Si, Akt  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Muhammad Abdul Aris, M.Si  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....  
.....  
.....)



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Agustus 2018

Penulis



**FATHONI SIDIQ ARI WIBOWO**

**B200110356**

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Pada Kabupaten / Kota di Pulau Jawa)**

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh PAD, size, kompleksitas dan pertumbuhan ekonomiterhadap kelemahan pengendalian intern. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tabel Produk Domestik Regional Bruto tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 84 Kabupaten dan 29 Kota. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 73 Kabupaten dan 28 Kota. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda. Hasil penelitian ini diketahui hanya PAD yang berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan ketiga variabel yaitu size, kompleksitas dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

**Kata kunci:** PAD, size, kompleksitas, pertumbuhan ekonomi, kelemahan pengendalian intern.

**Abstract**

The purpose of this study was to examine the effect of PAD, size, complexity and economic growth on the weakness of internal control. This research was a quantitative research using secondary data obtained from Report Realization of Regional Revenue and Expenditure Budget and Gross Regional Domestic Product table in 2016. Population in this research was all Local Government of Regency/City in Java Island except Jakarta Province which consist of 84 District and 29 Cities. The sample was determined by purposive sampling technique and obtained sample of 73 regencies and 28 cities. This research uses multiple regression analysis technique. The results of this study was known only PAD which has a significant positive effect on the weakness of internal control. While the three variables namely size, complexity and economic growth does not affect the weakness of internal control.

**Keyword:** *PAD, size, complexity, economic growth, the weakness of internal control*

**1. PENDAHULUAN**

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat

terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah (Martani dan Zaelani, 2011).

Adanya otonomi daerah di Indonesia menjadikan perlunya pengawasan atau pengendalian dalam menjalankan otonomi daerah agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam sebuah organisasi baik organisasi sektor publik maupun sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Berdasarkan KPMG Fraud Survey 2006 yang dilakukan di Carolina Amerika Serikat dalam Petrovits et all (2011) ditemukan bahwa lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebesar 33% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Faktor kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian intern yang telah ada sebesar 24%. Dari dua faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan pelaksanaan pengendalian intern sangat penting (Martani dan Zaelani, 2011). Untuk menciptakan pengendalian intern yang baik, pemerintah harus menetapkan tanggung jawab secara jelas dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan padanya. Apabila perumusan tanggung jawab tidak jelas dan terjadi suatu kesalahan, maka akan sulit untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut (Riandari, 2013). Hal ini juga didukung Pasal 47 PP No. 60 Tahun 2008 bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing (Syafudin, 2012).

Kelemahan pengendalian intern adalah kondisi dimana banyak temuan-temuan kasus yang terjadi terkait pengendalian intern yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Menurut Warren (2003), kelemahan pengendalian intern dapat dilihat dari tingkat kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan mengaudit memiliki tugas untuk mengawasi jalannya sistem pengendalian intern dalam organisasi pemerintah. Hasil audit yang

dilakukan oleh BPK menjadi indikator sejauh mana pengendalian intern Pemda telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ada beberapa penelitian yang menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi penentu kelemahan pengendalian intern. Puspitasari (2013) telah meneliti hubungan tingkat pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kompleksitas pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Martani dan Zaelani (2011) meneliti mengenai pengaruh ukuran, pertumbuhan dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah. Nirmala (2012) telah meneliti tentang pengaruh profitabilitas, ukuran, pertumbuhan dan kompleksitas transaksi terhadap kelemahan pengendalian internal. Kristanto (2009) meneliti tentang pengaruh ukuran pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal sebagai prediktor kelemahan pengendalian internal. Sedangkan Hartono (2014) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan, *size*, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartono, dkk (2014). Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh pertumbuhan, *size*, PAD dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta pada tahun periode 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh PAD, *size*, kompleksitas dan pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah.

Dalam penelitian Petrovits et all (2011) kompleksitas diukur dari banyaknya jumlah sumber pendapatan. Hasilnya menunjukkan semakin banyak jumlah sumber pendapatan membuat masalah pengendalian intern meningkat.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini kompleksitas akan dilihat dari jumlah PAD. Nilai setiap satu sumber PAD biasanya tidak terlalu besar sehingga jika nilai total PAD besar kemungkinan berasal dari jumlah sumber PAD yang banyak. Penelitian Martani dan Zaelani (2011) yang meneliti pengaruh PAD mempunyai hasil adanya pengaruh positif antara PAD dengan kelemahan pengendalian intern.

Ukuran sebuah entitas merupakan tingkatan aktivitas yang ada di dalam entitas tersebut. Apabila perusahaan yang memiliki aktivitas bisnis yang lebih besar tentu perusahaan tersebut memiliki jumlah ukuran yang besar. Perusahaan yang lebih besar memiliki akses yang besar pula untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, yang mana sumber pendanaan tersebut cenderung memiliki kelebihan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian intern.

Petrovits et al (2011) menemukan bahwa masalah pengendalian intern meningkat untuk organisasi nirlaba yang lebih kecil ukuran total asetnya. Semua penelitian tersebut menuju pada kesimpulan yang sama bahwa semakin besar ukuran suatu entitas maka kelemahan pengendalian intern akan semakin kecil. Organisasi yang besar juga memiliki sumber daya ekonomi yang lebih banyak untuk melakukan implementasi sistem pengendalian intern seperti melakukan training dan konsultasi sistem pengendalian intern. Zhang, Niu dan Zheng (2009) juga menyimpulkan terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan kualitas pengendalian intern.

Kompleksitas pemerintah daerah merupakan tingkat diferensiasi yang ada di pemerintah daerah sehingga dapat menyebabkan konflik atau masalah dalam pencapaian tujuan organisasi. Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern yang dijalankan. Kompleksnya jumlah segmen atau cabang organisasi pemerintah daerah mengandung resiko kelemahan yang lebih besar dan membutuhkan pengendalian intern yang lebih baik.

Penelitian Doyle, Ge, dan McVay (2007) menemukan hubungan positif antara jumlah segmen usaha atau cabang organisasi dengan kelemahan



pengendalian intern. Puspitasari (2013) dan Hartono (2014) menemukan adanya pengaruh kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut cukup besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari pengendalian intern yang dimiliki. Organisasi nirlaba yang sedang tumbuh memiliki masalah pengendalian intern yang lebih banyak (Petrovitset all,2011).Hal tersebut yang dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi berpotensi menyebabkan tingginya kelemahan pengendalian intern.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Doyle, Ge dan Mc Vay (2007) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki hubungan positif dengan kelemahan pengendalian intern.Penelitian Hartono (2014) menemukan bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.

## **2. METODE**

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tabel Produk Domestik Regional Bruto tahun 2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 84 Kabupaten dan 29 Kota.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 101 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 73 Kabupaten dan 28 Kota.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Kriteria pengambilan sampel yang digunakan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta tabel Produk Domestik Regional Bruto tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sepulau Jawa kecuali DKI Jakarta yang terdapat temuan KPI yang terdiri dari 84 Kabupaten dan 29 Kota. Dikarenakan data tidak normal maka dilakukan *outlier* dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 101 Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Pulau Jawa kecuali Propinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 73 Kabupaten dan 28 Kota. Setelah dilakukan *outlier*, maka dilakukan pengujian ulang hingga tidak terdapat *outlier* lagi. Data penelitian terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), *size* (ukuran), kompleksitas (SKPD), pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebagai variabel independen, dan temuan KPI sebagai variabel dependen.

Hasil perhitungan statistik deskripsi data peneliti ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	101	6.66E+10	4.09E+12	4.6995E+11	5.52958E+11
SIZE	101	23.62	31.16	28.8281	0.77738
SKPD	101	26.00	179.00	57.0990	21.64694
PDRB	101	0.08	525.00	10.8775	51.73560
KPI	101	2.00	13.00	6.5743	2.21967

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Pada tabel 1 di atas diketahui pada tahun 2016 nilai terkecil (Minimum) PAD sebesar Rp 66.595.690.839 yang merupakan PAD Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, sedangkan PAD terbesar (Maximum) sebesar Rp 4.090.206.769.388 yang merupakan PAD Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Sedangkan nilai ukuran pemerintah daerah (*size*) minimum sebesar 23.62 yang merupakan *size* dari Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sedangkan nilai

maksimum ukuran pemerintah daerah sebesar 31.16 yang merupakan ukuran pemerintah daerah dari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan nilai minimal kompleksitas daerah yang diukur dengan jumlah SKPD setiap Kabupaten/Kota sebesar 26 SKPD yang merupakan milik dari Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, sedangkan nilai maksimum kompleksitas daerah sebesar 179 SKPD yang merupakan milik dari Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Nilai minimal pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 0,08 yang merupakan PDRB dari Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, sedangkan nilai maksimum pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 525 yang merupakan milik dari Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Nilai minimal Temuan KPI sebesar 2 kasus yang merupakan temuan KPI dari Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kulon Progo Propinsi DIY selama tahun 2016, sedangkan nilai maksimum Temuan KPI sebesar 13 yang merupakan milik dari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh PAD terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Kabupaten/Kota Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap temuan KPI Kabupaten/Kota sepulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta selama periode 2016. Hasil ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan PAD akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern sepulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta selama periode 2016. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pendapatan asli daerah, namun luasnya kewenangan yang dimiliki beserta besarnya dana yang dikelola dapat mengakibatkan resiko terjadinya penyimpangan sehingga hal ini membuat tingginya kelemahan pengendalian intern dalam pemerintah.

Hal ini sesuai pendapat Martani dan Zaelani (2011) PAD secara signifikan berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmiyatun dkk (2018); Novilia (2017); Martani dan Zaelani (2011) dimana masing-masing hasil penelitian mereka juga memberikan bukti

empiris bahwa PAD secara signifikan berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal.

#### Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Kabupaten/Kota

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap temuan KPI Kabupaten/Kota sepulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta selama periode 2016. Hasil ini mengindikasikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan ukuran suatu pemerintah daerah tidak akan mempengaruhi banyaknya kasus kelemahan pengendalian internal yang terjadi.

Menurut Purniasari (2016) ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal, mengindikasikan bahwa pengendalian internal pemerintah daerah terhadap aset yang dimilikinya sudah baik. Pemerintah dalam hal ini berarti telah mampu berjalan sesuai dengan teori keagenan. Aset daerah pada hakikatnya adalah milik masyarakat, sehingga dalam teori keagenan masyarakat adalah principal. Pemerintah telah mampu menjalankan pengawasan terhadap aset secara baik sesuai dengan kehendak rakyat, karena aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurwati (2015); Fauza (2015); Purniasari (2016); Pamuji (2017) dimana masing-masing hasil penelitian mereka membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah yang dikur dengan total asset tidak berpengaruh terhadap temuan KPI

#### Pengaruh Kompleksitas Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Kabupaten/Kota

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas daerah tidak berpengaruh terhadap temuan KPI Kabupaten/Kota sepulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta selama periode 2016. kompleksitas tidak berpengaruh terhadap temuan KPI sehingga dapat diartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan kompleksitas suatu daerah yang diukur dengan jumlah kecamatan tidak akan mempengaruhi banyaknya kasus kelemahan pengendalian internal yang terjadi. Hal ini mungkin disebabkan karena indikator variabel kompleksitas daerah

yang memiliki karakteristik yang berbeda antara sektor swasta dengan sektor pemerintahan ataupun indikator yang digunakan peneliti kurang tepat. Jumlah kecamatan yang digunakan untuk mengukur variabel kompleksitas daerah pada setiap kabupaten/kota Se-Pulau Jawa kecuali Propinsi DKI Jakarta tetap atau tidak berubah selama tahun yang peneliti gunakan. Karena pengukuran hanya dilakukan selama tahun 2016, sehingga kompleksitas daerah tidak dapat terukur secara efektif.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Putri (2015); Rachmawati dan Handayani (2016) dan Pamuji (2017) dimana masing-masing hasil penelitian mereka juga menemukan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah

#### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Kabupaten/Kota

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal Kabupaten/Kota se-pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta selama periode 2016. Hasil ini mendukung pendapat Nurwati (2015) dalam penelitiannya bahwa besar atau kecilnya pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjamin pengendalian internalnya juga lebih baik dari pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Sebagian besar daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat, namun pertumbuhan yang baik belum tentu diikuti dengan peningkatan maupun pengurangan jumlah kasus kelemahan pengendalian internal.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yeni, dkk (2014); Fauza (2015), Putri (2015); dan Nurwati (2015) dimana masing-masing hasil penelitian mereka memberikan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

#### 4. PENUTUP

PAD berpengaruh terhadap temuan KPI se-pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta selama periode 2016, terbukti dari nilai  $t_{hitung} (2,664) > t_{tabel}(1,984)$  dengan signifikansi  $(0,009) < 0,05$ .

Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap temuan KPI se-pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta selama periode 2016, terbukti dari nilai  $t_{hitung} (-0,077) < t_{tabel}(-1,984)$  dengan signifikansi  $(0,939) > 0,05$ .

Kompleksitas daerah tidak berpengaruh terhadap temuan KPI se-pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta selama periode 2016, terbukti dari nilai  $t_{hitung} (0,071) < t_{tabel}(1,984)$  dengan signifikansi  $(0,943) > 0,05$ .

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap temuan KPI se-pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta selama periode 2016, terbukti dari nilai  $t_{hitung} (-1,051) > t_{tabel}(-1,984)$  dengan signifikansi  $(0,296) > 0,05$ .

Periode penelitian yang digunakan hanya 1 tahun yaitu tahun 2016 dengan jumlah sampel hanya kabupaten/kota se-pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta selama periode 2016.

Variabel yang digunakan hanya mencakup PAD, ukuran pemerintah daerah, kompleksitas, dan pertumbuhan ekonomi, dan dari hasil analisis hanya satu variabel yang mampu mempengaruhi temuan KPI.

Peneliti hanya menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, sehingga data yang dikumpulkan kurang luas atau kurang mewakili.

Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:

Diharapkan dapat memperpanjang periode tahun anggaran penelitian tidak hanya 1 tahun sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan diketahui perbandingan dari tahun ke tahun.

Diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan menambahkan wilayah provinsi semisal seluruh provinsi di Indonesia agar temuan KPI yang diperoleh lebih kompleks sehingga hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih.

Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel-variabel penelitian lain, seperti jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi, jumlah penduduk, temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, pemeringkatan *e-Government*, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan hasil pemeriksaan dengan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda, sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat digeneralisasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 2005."AICPA 's Statements on Auditing Standards (SAS) 58 - AU Section 508".
- Doyle, Jeffrey T.; Weili Ge, and Sarah E. McVay. 2007. Determinants of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting. *Journal of Accounting & Economics (JAE)*, September 2007. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=941467>.
- Fauza, Nailatul. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se Sumatera). *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015: 1-15.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hartono, Rudi; Amir Mahmud; dan Nanik Sri Utaminingsih. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram* 24-27 Sept 2014.
- Kristanto, Septian Bayu. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern. *Jurnal Akuntansi UKRIDA, Volume 9, No.1*
- Martani, Dwi dan Fazri Zaelani. 2011. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.
- Nirmala, Swastia. 2012. Analisa Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Laju Pertumbuhan dan Kompleksitas Transaksi Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. *Skripsi Sarjana*. FEB UNDIP. Semarang.

- Novilia, Fitri. 2017. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Temuan Audit Bpk Atas Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Nurwati, Ika. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012). *Naskah Publikasi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pamuji, Fahrani Arif. 2017. Pengaruh Size, Pad, Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Y. Tahun 2009-2014). *Naskah Publikasi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Petrovits, Christine , Shakespeare, Chaterine, dan Shih, Aimee. 2011. The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations. *The Accounting Review* Volume 86, Issue 1 (January 2011).
- Purniasari, Cici. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014). *Naskah Publikasi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Puspitasari, Titus. 2013. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Skripsi Sarjana*. FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Putri, Novi Kumala. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat tahun 2012). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Rachmawati, Dian Eka dan Nur Handayani. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 4, April 2016: 1-17.



- Rahmiyatun, Fitri; Ellyta Muchtar; dan Rina Lestari. 2018. Kajian Mengenai Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *JMM Online* Vol . 2 No.1 Januari (2018) 13-23.
- Riandari, Esti. 2013. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Di Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Syafrudin, Yan. 2012. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien dan Bebas Korupsi (Studi Kasus terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010. *Tesis*.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Warren. 2003. *Accounting*. 20th edition. South Western. Mason- Ohio.
- Yeni, Efrida; Popi Fauziati; dan Nurhuda. N. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat 2010-2012). *Jurnal Penelitian*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.
- Zhang, Niu dan Zheng. 2009. Research on the determinants of the quality of internal control: evidence from China. *International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering Paper*.